

SKRIPSI

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK



OLEH :

HERI SUNENI
10675005109

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU**

**RIAU
2010**

SKRIPSI
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KECAMATAN KERINCI KANAN
KABUPATEN SIAK

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Sarjana (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru



Disusun Oleh:

HERI SUNENI
10675005109

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU

2010

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI KECAMATAN KERINCI KANAN
KABUPATEN SIAK**

**ABSTRAK
OLEH**

HERI SUNENI

Penelitian ini dilaksanakan kepada masyarakat di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Provinsi Riau. Adapun tujuan penelitian ini terdiri dari dua tujuan, yaitu : untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga (KK) sebagai wajib pajak yang ada di wilayah Kecamatan Kerinci Kanan, mengingat jumlah populasi terlalu banyak, maka teknik penarikan sampelnya digunakan secara Cluster Sampling yaitu suatu teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti sangat luas, karena desa-desa di Kecamatan Kerinci Kanan berstrata (tidak sama). Maka pengambilan sampelnya menggunakan Stratified Random Sampling, yaitu suatu teknik yang digunakan apabila populasi mempunyai unsur/anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proposional, sebesar 5% dari wajib pajak.

Dalam pengambilan data, menggunakan data primer dan sekunder yang dilakukan secara observasi, wawancara dan penyebaran angket kepada responden, selanjutnya data tersebut dianalisis secara Deskriptif Kualitatif lalu disusun dan dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah Partisipasi Masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan kemudian diambil suatu kesimpulan.

Dari pengolahan data yang dilakukan dapat disimpulkan dalam partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kerinci Kanan cukup baik yaitu sebagian besar responden 252 (73,4%) dari seluruh masyarakat yang terwakili (responden) sebagai subjek pajak PBB adalah pembayar pajak setia.

Baiknya masyarakat membayar PBB di Kecamatan Kerinci Kanan itu tidak terlepas dari kesadaran masyarakat itu sendiri bahwa PBB merupakan hal yang wajib harus dibayar tiap tahunnya dan kesesuaian antara luas tanah dan bangunan yang dimiliki dengan jumlah yang harus dibayar serta pelayanan yang baik dan manfaat yang dapat dirasakan dari pembayaran PBB itu sendiri. Disamping itu responden juga sudah menyiapkan anggaran setiap tahunnya yang dipotong oleh kelompok tani masing-masing responden dalam membayar PBB.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1. 1 Latar Belakang Masalah.....	1
1. 2 Rumusan Masalah	8
1. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. 4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	12
2.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak.....	13
2.3 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	16
2.4 Klasifikasi Pajak.....	19
2.5 Pajak Dalam Pandangan Islam	20
2.6 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	23
2.7 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	25
2.8 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	26
2.9 Defenisi Konsep	27
2.10 Teknik Pengukuran.....	29
2.11 Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian.....	32
3.2 Jenis dan Sumber Data	32
3.3 Populasi dan Sampel	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5 Analisis Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Karakteristik Wilayah.....	36
4.2 Keadaan Demografi	37
4.3 Struktur Pemerintahan	43

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	53
5.2 Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi	57
5.3 Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.....	68

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	76
6.2 Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Guna untuk meningkatkan pendapatan Negara untuk pembangunan Nasional, salah satunya adalah sumber pendapatan dalam sektor perpajakan. Diantara jenis-jenis Pajak yang ada di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan Nasional sebagai pengamalan pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Pembangunan di Indonesia tentu saja membutuhkan dana atau pembiayaan yang sangat besar jumlahnya. Jika dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemasukan dana yang diterima oleh Negara diperoleh dari dua sumber yaitu penerimaan dari dalam Negeri dan bantuan Luar Negeri. Penerimaan dari dalam Negeri diperoleh dari sektor Minyak dan Gas (Migas) dan sektor Non Migas (Pajak dan non Pajak). Sedangkan bentuk bantuan dari luar negeri adalah bantuan program dan bantuan proyek.

Penerimaan Pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi Negara, karena besarnya Pajak seiring dengan laju pertumbuhan pendidikan, perekonomian dan stabilitas politik sedangkan penerimaan disektor Migas sesuai

dengan hukum alam jika di eksploitasi secara terus menerus cenderung akan berkurang dan nantinya akan habis. Bagaimanapun Pajak dipungut tidak terlalu membebani masyarakat dan adil dalam pelaksanaannya. Adapun masalah Pajak termaktub dalam pasal 2 ayat (2) UUD 1945 yang bunyinya : Pengenaan dan pemungutan Pajak (termasuk bea cukai) untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-Undang.

Adapun pengertian Pajak menurut Rachmat Soemitro dalam Sri Pudyatmoko (2002:2) adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiaya public investment. Pajak adalah suatu kewajiban ke Negara dan pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan Negara berupa pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk kesejahteraan Bangsa dan Negara.

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, Pajak adalah primadona penerimaan yang paling potensial. Penerimaan Negara dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana kepentingan umum. Dengan kata lain, pendapatan Negara dari sektor Pajak merupakan “motor penggerak” kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi Pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya pembangunan Nasional akan berhasil jika kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat disuatu Negara. Jadi dalam pelaksanaannya Pemerintah berusaha melibatkan rakyat dalam pembangunan tersebut.

Sadono Sukirno (2006:11) berpendapat, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu Negara meningkat secara berketerusan dalam jangka panjang.

Berdasarkan pendapat Sadono Sukirno tersebut dalam usaha meningkatkan pendapatan tersebut, Pemerintah ingin melibatkan rakyat dalam pembangunan secara keseluruhan yaitu dengan keterlibatan dalam usaha pembayaran Pajak, baik itu Pajak pendapatan, Pajak Penjualan maupun Pajak-Pajak lainnya. Seperti kita ketahui peran Pajak disini berguna dalam membantu dana untuk pembiayaan pembangunan yang ditunjukkan Pemerintah untuk rakyat.

Ditinjau dari system keuangan Negara, Pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan unsur yang penting sebagai pemasok dana bagi anggaran Negara. Bahkan diberapa Negara (diantaranya Indonesia), perolehan dana dari Pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan Negara. Oleh karena itu, hampir Negara didunia memberlakukan dan mengenakan Pajak atas masyarakatnya sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, dengan jenis sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu Negara lainnya (Liberty Pandiangan, 2002 : 19).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak

atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Oleh karena itu wajar apabila mereka wajib memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran Pajak.

Selanjutnya Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan Daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini kita dapat lihat peraturan menteri keuangan Republik Indonesia No. 34 tahun 2005 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. 10% untuk Pemerintah Pusat
- b. 90% untuk Daerah

Dana bagi hasil penerimaan PBB sebesar 90% bagian Daerah dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16,2% untuk Daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
- b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota
- c. 9% untuk membiayai pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jendral Pajak dan Daerah

Sedangkan 10% bagian Pemerintah pusat dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh Daerah Kabupaten dan Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut :

- a. 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh Daerah Kabupaten dan Kota.
- b. 3,5% dibagikan secara insentif kepada Daerah Kabupaten dan Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Dapat ditegaskan, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sumber penerimaan Pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses pembangunan Nasional yang dicanangkan Pemerintah, karena diketahui sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat suatu Daerah khususnya merupakan subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga memungkinkan sekali penerimaan sektor Pajak ini terus ditingkatkan dalam menggalang sumber pembiayaan pembangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan yang termasuk ke dalam Pajak Negara yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Siak cukup dapat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah yang ada di Kabupaten Siak sehingga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat.

Selanjutnya Kabupaten Siak terdiri dari 14 Kecamatan yang telah memberikan kontribusinya kepada Daerah, hal ini dapat dilihat pada tabel realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Siak selama tahun 2008.

Tabel 1.1 : Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Tahun 2008.

NO	DESA	TARGET	REALISASI	%
1	Kerinci Kanan	52.394.002	35.682.109	68,04
2	Kerinci Kiri	20.730.681	7.996.350	38,57
3	Buana Bhakti	16.536.237	5.470.184	33,07
4	Bukit Harapan	12.366.615	5.895.021	47,66
5	Kumbara Utama	13.811.394	4.903.649	35,50
6	Bukit Agung	32.804.005	17.850.303	54,41
7	Simpang Perak Jaya	14.917.250	5.081.493	34,09
8	Buatan Baru	10.435.657	4.409.471	42,25
9	Gabung Makmur	9.957.663	3.847.064	38,63
10	Jati Mulya	10.421.380	3.542.749	33,99
11	Seminai	13.081.000	5.074.981	38,79
12	Delima Jaya	7.341.381	3.035.896	41,35
Jumlah		208.797.265	102.789.270	49,23

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2008.

Kecamatan Kerinci Kanan tempat penelitian penulis merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Berdasarkan tabel realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat diketahui bahwa Kecamatan Kerinci Kanan memiliki potensi yang besar sementara itu kontribusinya masih kurang. Hal ini juga dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2 : Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Kerinci Kanan dari Tahun 2005-2008.

NO	Tahun	Target (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)	%
1	2005	98.548.709	50.920.592	49,2
2	2006	108.562.906	73.204.396	67,4
3	2007	197.738.653	92.630.211	47
4	2008	208.797.265	102.789.270	49,2

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kerinci Kanan, Tahun 2005-2008.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa-Desa yang ada dalam Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2008, dalam proses pelaksanaannya ada indikasi kurang baik. Hal ini ditandai dengan target Pajak sebesar 208.797.265,- sementara realisasi hanya 102.789.270,- dari gambaran tersebut terlihat bahwa partisipasi masyarakat masih rendah dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa-Desa Kecamatan Kerinci Kanan.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa penerimaan Negara maupun suatu Daerah tidak hanya berasal dari sumber kekayaan alami, hasil perusahaan Negara/Daerah atau pinjaman dan lainnya tetapi berasal dari partisipasi masyarakat berupa Pajak-Pajak yang harus dibayar sesuai peraturan yang berlaku.

Supaya penerimaan Pajak ini dapat berhasil dan dapat dijadikan sumber pemasukan Negara serta wajib Pajak itu mau membayar, maka setiap orang harus mengerti tentang arti dan fungsi Pajak itu sebenarnya. Tanpa adanya pengertian dari masyarakat mustahil akan terjadi peningkatan pendapatan Negara dari sektor Pajak.

Pada sekarang ini masih cukup banyak masyarakat yang tidak sadar akan kewajibannya untuk membayar Pajak, mereka enggan memenuhi kewajiban yang

hanya sekali setahun itu. Penduduk atau rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk memperlancar roda Pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat atau penduduk itu sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan itu adalah untuk kepentingannya sendiri dari generasi kegenerasi.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti dan melihat keadaan yang sebenarnya dilapangan, untuk itu penulis mengambil judul : **“ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK”**.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar masalah, bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan, baik itu pembangunan Nasional maupun pembangunan Daerah.

Karena dengan adanya partisipasi dari masarakat dalam pembangunan diharapkan terjadinya pembangunan yang terus meningkat dari tahun ketahun. Ini semua dapat terjadi apabila kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk berpartisipasi di dalam pembangunan itu. Adapun bentuk partisipasi tersebut salah satunya dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu **“ Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kerinci Kanan”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

b. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memberikan gambaran pada masyarakat bagaimana cara dan prosedur dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Sumbangan pikiran kepada pihak yang mempunyai hubungan dengan masalah ini.
3. Sebagai bahan informasi peneliti-peneliti lainnya, dalam konteks permasalahan yang sama.
4. Dapat menambah wawasan dan memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan tentang perpajakan, khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian

BAB II : Telaah Pustaka

Dalam bab ini berisikan telaah pustaka yang merupakan landasan teori yang menyangkut reprensi-reprensi dan buku-buku dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu, pengertian partisipasi masyarakat, pengertian pajak bumi dan bangunan, klasifikasi pajak, objek dan subjek PBB, dsar hukum pengenaan PBB, tarif PBB, definisi operasional, teknik pengukuran dan hipotesis.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisikan tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengukuran data, populasi dan sampel dan analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukannya penelitian. Seperti lokasi penelitian, karakteristik dan demografi.

BAB V : Analisa Data

Dalam bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kerinci Kanan.

BAB VI : Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi kedepannya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Ditinjau dari etimologis, bahwa kata partisipasi adalah merupakan padanan dari kata *Participatie* (Bahasa Belanda), atau *participation* (bahasa Inggris) yang berarti bagian atau ikut serta. Selamat (1990 :26) mengemukakan bahwa partisipasi adalah peran serta dalam pembangunan dapat di artikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam menyusun program pembangunan ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan ikut sertanya memanfaatkan hasil pembangunan yang nyata”.

Sedangkan menurut Seligman dan Edwin dalam Muhammad Al Amin (2003 : 9) menyatakan bahwa “pengertian partisipasi adalah ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengambil bagian dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh susunan kesatuan yang lebih besar ” dari rumusan di atas data kita lihat bahwa partisipasi itu selalu dominant bahkan tidak dapat dipisahkan dalam segala kehidupan masyarakat ataupun kelompok masyarakat.

Partisipasi masyarakat, berarti masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan menyertai Pemerintah karena kenyataannya Pemerintahlah yang sampai saat ini merupakan perancang, penyelenggara dan pembayar utama dari pembangunan. Masyarakat diharapkan ikut serta, karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai terutama oleh Pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat itu sendiri, untuk rakyat banyak.

Untuk lebih rincinya dalam hal partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga dirumuskan oleh para ahli lainnya seperti : Hanafiah dalam A. Sanit (1990 : 21) menjelaskan bahwa peran serta tidak hanya pengertian di tempat lokal seperti turut serta bersa individual dalam proyek Pemerintahan dan tidak hanya dalam hubungan produksi tetapi harus lebih luas. Peran serta harus meliputi segenap kehidupan masyarakat dalam segala bentuk melalui komunikasi social”. Sementara Raharjo dalam A. Sanit (1990 : 23) mengemukakan “partisipasi di artikan sebagai dana dan daya yang dapat disediakan sebagai proyek-proyek Pemerintah”.

Sedangkan Wahyudi Komorotomo (2005:136-138) mengatakan partisipasi warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu :

1. Partisipasi dalam pemilihan (*electoral participate*)
2. Partisipai kelompok (*group participation*)
3. Kontak antara warga Negara dan Pemerintah (*citizen-government contacting*)
4. Partisipasi warga Negara secara langsung dilingkungan Pemerintah

Disamping itu, adanya partisipasi masyarakat didasarkan pada pertimbangan “bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk masa berikutnya”.(Miriam Budiarmo dalam Josef Riwu Kaho, 2002 :112)

2.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak

Pada hakikatnya partisipasi masyarakat itu adalah suatu keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan.

Adapun beberapa factor-faktor lain yang sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak hal ini Pangabea (1998:43) menyatakan

- a. Tingkat Pendidikan
- b. Tingkat Pendapatan
- c. Jarak tempat tinggal
- d. Sikap
- e. Penyuluhan

Dalam hal ini penyuluhan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan membuat wajib Pajak menjadi mengerti akan fungsi dan arti Pajak itu sebenarnya agar pendapatan dari sektor Pajak menjadi optimal maka perlu sekali diadakan penyuluhan dari aparat perpajakan.

Adapun program penyuluhan adalah suatu pernyataan tertulis tentang keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan yang disusun secara sistematis (Markdianto, 1997).

Sesuai uraian di atas penyuluhan merupakan suatu yang pokok yang dilaksanakan dalam mencapai suatu program. Penyuluhan dapat dikatakan salah satu ujung tombak dalam memberhasilkan suatu program. Hal itu sesuai pendapat Markdianto (1997) bahwa sasaran penyuluhan dimaksudkan untuk mengubah dalam arti agar mereka memiliki dan dapat meningkatkan prilakunya mengenai sikap yang lebih progresif, pengetahuan yang luas dan kesadaran dalam kewajibannya sebagai wajib pajak.

Didalam literatur ilmu keuangan Negara faktor yang mempegaruhi optimalisasi pemasukan dana dari partisipasi masyarakat dengan membayar pajak ke kas Negara adalah:

- a. Filsafat Negara
- b. Kejelasan Undang-Undang
- c. Tingkat Pendidikan
- d. Kualitas dan Kuantitas Petugas Pajak Setempat
- e. Strategi yang Diterapkan Organisasi Pajak di Indonesia

Menurut W.J. Delangen (Buhari, 2005 : 38) terdapat teori-teori yang memberikan dasar pembenaran mengenai wewenang Negara yang mengharuskan masyarakat untuk membayar pajak berdasarkan:

- a. Teori Asuransi
- b. Teori Kepentingan
- c. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Pengorbanan)
- d. Teori Gaya Beli
- e. Teori Gaya Pikul

Gaya pikul adalah kekuatan untuk membayar uang kepada Negara, jadi untuk membayar Pajak, setelah dikurangi dengan minimum kehidupan (Basic needs). Basic needs ini seperti makan, pakaian, perumahan dan biaya pendidikan W.J. Delangen (Buhari, 2005 : 38)

Gaya pikul adalah sama dengan sebuah jembatan. Maksudnya adalah kekuatan masyarakat untuk menyerahkan uang kepada Negara baru ada jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia.

2.3. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan keuangan Daerah sebagai modal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah, maka telah disusun rencana pembiayaan tersebut dalam bentuk RAPBD setiap tahunnya dengan mengakumulasikan berbagai sumber pendapatan atau subsidi lainnya, apalagi Daerah otonom yang dituntut kemampuannya untuk mengatur urusan rumah tangga pembiayaan sendiri pula.

Artinya Pemerintah Daerah harus senantiasa berupaya meningkatkan pembiayaan bagi Daerahnya dengan menggali sumber-sumber pendapatan asli Daerah (PAD) yang terdapat di Daerah, yang menurut pasal 157 UU No. 32 tahun 2004 terdiri dari :

- a. Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut (PAD)
 1. Hasil Pajak Daerah
 2. Hasil Retribusi Daerah
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 4. Lain-Lain PAD
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Menurut Rochmat Soemitro dalam Sri Pudjatmoko (2002 :20) mengatakan bahwa Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untkn membayar pengeluaran umum.

Selanjutnya menurut para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada Negara dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari Negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disuatu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, budaya dan tujuan-tujuan lain yang diacapai oleh Negara.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditegaskan, Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh masyarakat (sebagai wajib Pajak) kepada kas Negara atas jasa yang diberikan Pemerintah dan sifatnya dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang penggunaanya diperuntukan bagi membiayaan rumah tangga Pemerintah, Pemerintah Daerah, baik itu belanja rutin maupun pembangunannya.

Dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal I mengenai ketentuan umum perpajakan, bahwa dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan.

Adapun berdasarkan pendapat Muhammad Rusjdi Tahun 2009 yang mengatakan pungutan Pajak bumi dan bangunan adalah iuran yang diwajibkan pada orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh atas bumi, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan.

Berbicara mengenai Pajak bumi dan bangunan mengandung pengertian pungutan yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Untuk memperjelas tentang penerimaan Pajak bumi dan bangunan ditentukan subjek dan objek Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumi dan bangunan, bahwa yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan, yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pendalaman serta laut wilayah Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak kebendaan atas bumi dan atau bangunan terhadap subjek Pajak orang pribadi atau badan secara nyata mempunyai

hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.4. Klasifikasi Pajak

Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan Pajak bumi dan bangunan yang terutang.

Faktor Yang Menentukan Klasifikasi Objek

- a. Bumi/Tanah
 1. Letak
 2. Peruntukan
 3. Pemanfaatan
 4. Kondisi Lingkungan
 5. Dan Lain-Lain
- b. Bangunan
 1. Bahan bangunan
 2. Rekayasa
 3. Letak
 4. Kondisi Lingkungan
 5. Dan Lain-Lain

Adapun klasifikasi Pajak secara umum yaitu sebagai berikut :

a. Menurut Golongannya

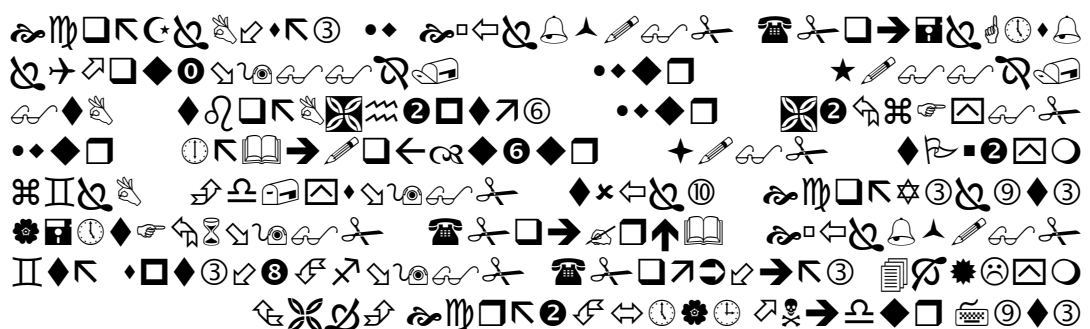
1. Pajak Langsung, yaitu Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
2. Pajak tidak langsung, yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak subjektif, yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib Pajak
2. Pajak objektif, yaitu Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib Pajak

2.4. Pajak Dalam Pandangan Islam

Adapun mengenai pajak dalam Islam dapat kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Taubah ayat 29.



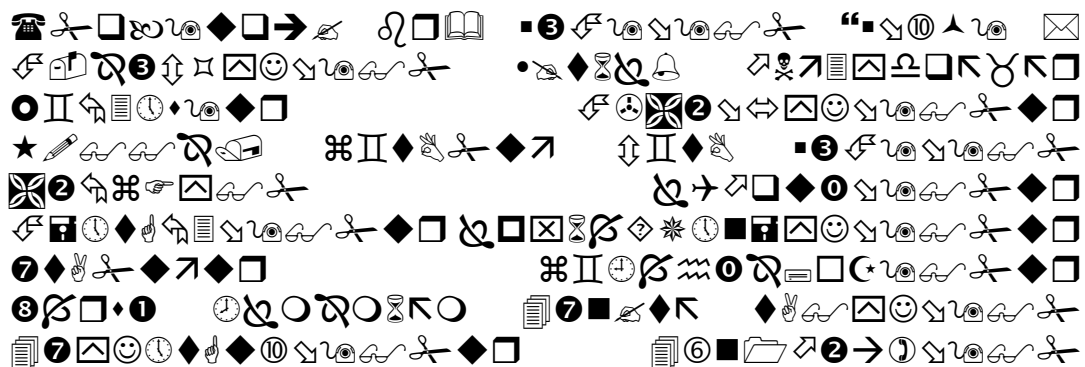
Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh

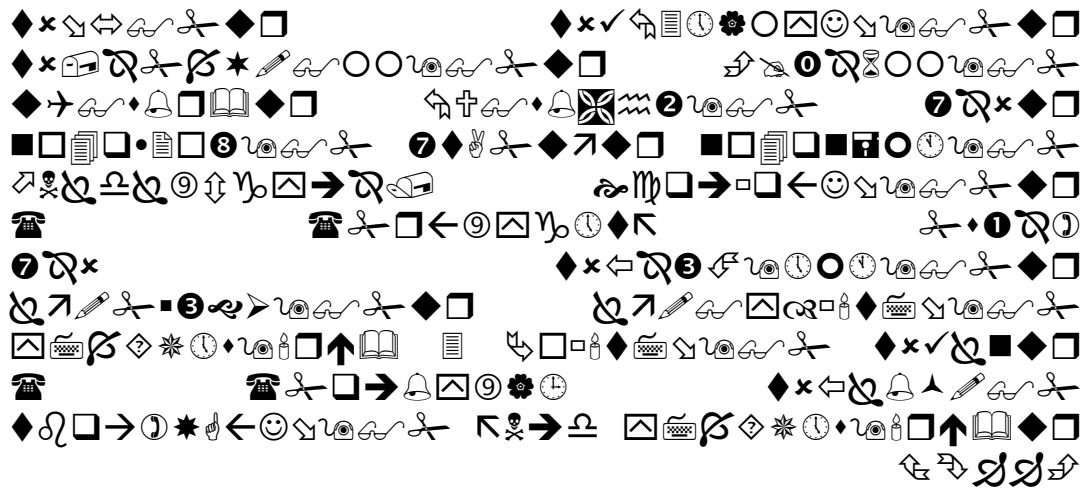
Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.(QS. At-Taubah : 29)

Yang dimaksud dengan *jizyah* ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undangnya wajib ditunaikan oleh kaum muslimin selama itu untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sector kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Menurut Didin Hafidhuddin (2002 : 61-63) ada beberapa alasan keharusan bagi kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan Negara, antara lain sebagai berikut :

Pertama, Firman Allah SWT surah Al-Baqarah : 177





Artinya : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah : 177)

Imam Al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat ini dalam kalimat (“.... Dan memberikan harta yang dicintainya.....”) mengemukakan bahwa para ulama telah sepakat, jika kaum muslimin khususnya, walaupun sudah menunaikan zakat tetapi memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut. Terkait dengan ayat ini, Imam Al-

Qurtubhi juga mengemukakan sebuah hadits riwayat Daruquthni dari Fathimah binti Qayis, Rasulullah SAW bersabda, “ *Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain diluar zakat*”.

Kedua, perintah dari *ulil amri* (Pemerintah) wajib ditaati selama mereka menyuruh pada kebaikan dan ketaatan serta kemaslahatan bersama. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisaa’ : 59.



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (QS. An-Nisa : 59)

Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan kemaslahatan bersama dan bertentangan dengan nilai-nilai islam, maka tidak ada alasan bagi umat islam untuk membayar pajak.

Ketiga, solidaritas social dan tolong-menolong antara sesama kaum muslimin dan sesame umat manusia dalam kebaikan dan taqwa.

2.5. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan, yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pendalaman serta laut wilayah Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

Yang termasuk pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan seperti Hotel, Pabrik, dan Elasement dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek tersebut
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Disamping itu yang disebut dengan subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan, maka yang dimaksud subjek Pajaknya adalah orang atau badan yang:

- a. Mempunyai suatu hak atas bumi;dan/atau
- b. Memperoleh manfaat atas bumi;dan/atau
- c. Memiliki atau menguasai bangunan;dan/atau
- d. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Dengan demikian dapat ditegaskan, subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemilik bumi dan bangunan dalam pengertian UU No.12 Tahun 1994, dan objeknya adalah bangunan atau benda yang tidak bergerak.

2.6. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang no 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Telah Dirubah Dengan Undang-Undang No 12 tahun 1994.
- b. Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 Tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

- c. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan
- d. Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No 82/KMK.04/2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- e. Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/KMK.04/1985 Tentang Tata Cara Pendaftaran Objek PBB
- f. Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK.04/1985 Tentang Tata Cara Penagihan PBB dan Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa.
- g. Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK.04/1985 Tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II.
- h. Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1998 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.7. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif Pajak yang dikenakan atas objek Pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen)

a. Dasar Pengenaan Pajak

1. Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
2. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh kepala kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan memperhitungkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota/ (Pemerintah Daerah) setempat.
3. Dasar perhitungan Pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak
4. Besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi Nasional

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah tiga tahun sekali. Namun demikian untuk Daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, angka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.

Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib Pajak di Daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP yaitu :

a. Sebesar 40% Pajak Perkebunan

1. Objek Pajak kehutanan
2. Objek Pajak kehutan.
3. Objek Pajak lainnya, yang wajib Pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

b. Sebesar 20% dari NJOP untuk :

1. Objek Pajak pertambangan
2. Objek Pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

2.8. Definisi Konsep

Guna mendapat persamaan pengertian tentang konsep-konsep dalam penulisan ini serta untuk menghindari kesalahan penafsiran maka penulis merasa perlu mengemukakan konsep-konsep dan memberikan penjelasan terhadap indikator-indikatornya :

a. Pendidikan adalah status seseorang mendapatkan pendidikan formal dari :

1. Perguruan Tinggi/Akademi atau yang sederajat.
2. Sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
3. Sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat
4. Sekolah dasar atau sederajat.

b. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah jenis pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang, dalam mendapat balas jasa atau sesuai dengan pekerjaan yang ditekuninya. dalam hal ini jenis pekerjaan tersebut adalah :

1. Bersifat formal adalah pekerjaan yang jelas dalam struktur dan tingkatannya seperti departemen atau perusahaan.
2. Bersifat non formal adalah pekerjaan yang tidak ada strukturnya.

- c. Pendataan Objek Pajak adalah pengumpulan data-data mengenai Bumi dan Bangunan, petugas wajib melakukan pengukuran-pengukuran yang akurat dan benar dilapangan atau lokasi.
- d. Pengiriman SPPT atau surat pemberitahuan Pajak terhutang adalah pemberian surat Pajak terhutang kepada wajib Pajak untuk membayar Pajak mereka, sesuai dengan jumlah tanah dan bangunan mereka.
- e. Penyuluhan wajib Pajak adalah pemberian pengetahuan kepada wajib Pajak agar lebih mengerti tentang arti dan fungsi Pajak.

2.9. Teknik Pengukuran

Agar dalam penelitian ini lebih baik dan ilmiah serta diakui kebenarannya maka perlu digunakan suatu pengukuran agar tidak terjadi kesalahan nantinya dilapangan. Dalam teknik pengukuran ini, penulis mencoba mengukur melalui variabel-variabel yang ada dalam definisi operasional.

- a. Pendidikan adalah salah satu dari faktor yang menentukan tingkat pendapatan dan partisipasi seseorang untuk itu dapat kita lihat :
 - 1. Tinggi, apabila pendidikan masyarakat tamatan Perguruan Tinggi/Akademi
 - 2. Sedang, apabila pendidikan masyarakat tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
 - 3. Rendah apabila pendidikan masyarakat tidak tamat sekolah dan Sekolah Dasar.

- b. Jenis pekerjaan adalah macam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini khusus jenis pekerjaan wajib Pajak, dapat diukur sebagai berikut
1. Tinggi apabila 70-100 % jumlah penduduk mempunyai pekerjaan disektor formal
 2. Sedang apabila 50-69 % jumlah penduduk mempunyai pekerjaan disektor formal
 3. Rendah apabila jumlah penduduk yang bekerja disektor formal kecil dari 49%
- c. Pendataan objek Pajak adalah pengukuran objek Pajak oleh petugas untuk menentukan seberapa besar jumlah Pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib Pajak dapat di ukur sebagai berikut :
1. Baik, apabila pendapatan objek Pajak oleh petugas berdasarkan data yang didapat dari lapangan yang benar dan akurat
 2. Sedang, apabila pendataan objek Pajak oleh petugas dimana petugas mendatangi wajib Pajak tetapi tidak melakukan pengukuran
 3. Rendah apabila petugas melakukan pendataan berdasarkan perkiraan semata-mata
- d. Pengiriman SPPT adalah pemberian surat Pajak terhutang kepada wajib Pajak agar membayar Pajak sesuai dengan batas jatuh tempo dapat diukur sebagai berikut :

1. Baik, apabila pengiriman surat pemberitahuan Pajak terhutang dilakukan 1 sampai 5 bulan sebelum batas akhir pembayaran Pajak atau jatuh tempo.
2. Sedang, apabila pengiriman surat pemberitahuan Pajak terhutang dilakukan 6 sampai 11 bulan sebelum batas akhir pembayaran atau jatuh tempo.
3. Buruk, apabila pengiriman surat pemberitahuan Pajak terhutang dikirim 1 bulan menjelang batas akhir pembayaran Pajak atau jatuh tempo.

2.10. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Jadi hipotesis juga dapat menyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2005 :70).

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah maka penulis mengambil Hipotesa yaitu : **“Diduga Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Kerinci Kanan kabupaten Siak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Masih Rendah”**.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis adalah di Kecamatan Kerinci Kanan, yang merupakan salah satu dari 14 belas Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak, adapun Kecamatan Kerinci Kanan terdiri atas dua belas Desa.

3.2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. Responden dari penelitian ini yaitu kepala keluarga yang menjadi wajib pajak yang diambil sebagai sampel dan kemudian data tersebut diantaranya :

1. Data tentang responden
2. Data tentang tingkat pembayaran atau kesediaan membayar PBB.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui Instansi Pemerintah yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Data ini berfungsi untuk mempermudah penelitian antara lain data tentang

1. Lokasi penelitian
2. Keadaan wilayah, penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat
3. Keadaan sarana dan prasarana
4. Data sekunder lainnya yang dianggap perlu dan berguna bagi penelitian

3.3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2005 :90)

Adapun yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang bertempat tinggal di Kecamatan Kerinci Kanan yang berjumlah 2526 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh Populasi tersebut. Bila Populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada Populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari Populasi (Sugiyono 2005 : 91).

Sedangkan untuk ukuran sampel dari populasi menggunakan rumus Slovin, dimana penetapan sampel mempertimbangkan batas ketelitian yang dapat mempengaruhi kesalahan pengambilan sampel populasi. Adapun rumus Slovin tersebut adalah :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Dimana

n = Ukuran Sample

N = Ukuran Populasi

e = Nilai Kritis (batas ketelitian) yang di inginkan

Adapun jumlah populasi dari penelitian ini adalah sebesar 2526, maka dengan besarnya jumlah populasi tersebut dan demi menghemat biaya, tenaga dan waktu yang dilaksanakan dalam penelitian ini maka penulis mengambil sampel dengan batas ketelitian sebesar 5 %. Dengan menggunakan rumus Slovin dengan populasi 2526 maka didapatkan sampel sebesar 345, kemudian teknik penarikan sampelnya digunakan secara Cluster Sampling, yaitu suatu teknik sampling Daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti sangat luas, karena Desa-Desa di Kecamatan Kerinci Kanan berstrata (tidak sama) maka pengambilan sampelnya menggunakan secara proporsional (Sugiyono,2005 : 93). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel di Kecamatan Kerinci Kanan

NO	DESA	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE %
1	Kerinci Kanan	430	59	5
2	Buana Bhakti	459	63	5
3	Bukit Harapan	384	52	5
4	Kumbara Utama	337	46	5
5	Seminai	625	85	5
6	Delima Jaya	291	40	5
Jumlah		2526	345	5

Sumber : Kantor Camat Kerinci Kanan Tahun 2009.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Yaitu teknik pengamatan langsung oleh penulis dengan melihat dari dekat gejala-gejala yang ada dilapangan yang menjadi objek penulis

2. Interview

Yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah penelitian.

3. Kuesioner

Yaitu dengan membuat daftar pertanyaan (angket) yang disusun secara tertulis dan diajukan kepada responden untuk mendapatkan jawaban data yang dicari.

3.5 Analisis Data

Adapun setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut akan dikelompokkan dan kemudian data di analisa secara deskriptif kualitatif lalu disusun dan dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan kemudian di ambil kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Karakteristik Wilayah

Kecamatan Kerinci Kanan terbentuk pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Tualang, Kecamatan Dayaun, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan Sungai Mandau. Pada saat itu Kecamatan Kerinci Kanan terdiri dari 18 Desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan bekas pemukiman Transmigrasi. Kemudian pada Tahun 2002 di mekarkan lagi menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Dalam, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 41 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kecamatan Kandis, Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Koto Gasib.

Pemekaran wilayah Kecamatan diharapkan dapat lebih memperlancar koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kecamatan dan tentunya yang paling penting adalah kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

Setelah di mekarkannya Kecamatan Kerinci Kanan menjadi Kecamatan Lubuk Dalam, pada saat ini Kecamatan Kerinci Kanan terdiri dari 12 Desa. Adapun luas wilayah Kecamatan Kerinci Kanan $\pm 27.169,88$ Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Dalam
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan

- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tualang
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan

Selanjutnya luas wilayah Kecamatan Kerinci Kanan menurut perdesa-desa yang ada di Kecamatan Kerinci Kanan yang meliputi:

- a. Kerinci Kanan luas wilayahnya 9.964,00 Ha
- b. Kerinci Kiri luas wilayahnya 2294,23
- c. Buana Bhakti luas wilayahnya 1309,90
- d. Bukit Harapan luas wilayahnya 1347,00
- e. Kumbara Utama luas wilayahnya 1200,00
- f. Bukit Agung luas wilayahnya 3141,00
- g. Simpang Perak Jaya luas wilayahnya 1309,00
- h. Gabung Makmur luas wilayahnya 1038,00
- i. Jati Mulya luas wilayahnya 1116,00
- j. Buatan Baru luas wilayahnya 1607,00
- k. Seminai luas wilayahnya 1928,75
- l. Delima Jaya luas wilayahnya 915,00

4.2 Keadaan Demografi

a. Jumlah Penduduk Kecamatan Kerinci Kanan

Penduduk merupakan suatu unsur yang penting dalam sebuah pembangunan, baik itu sebagai objek maupun subjek pembangunan itu sendiri. sebagaimana telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa penduduk merupakan modal dasar pelaksanaan

pembangunan. Dengan demikian berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai sumber potensial yang menggerakkan dan digerakan dalam proses pembangunan.

Penduduk dalam wilayah Kecamatan Kerinci Kanan pada tahun 2009 berjumlah 17.541 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Kerinci Kanan.

NO	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Pria	Wanita	
1	Kerinci Kanan	960	869	1829
2	Kerinci Kiri	897	777	1674
3	Buana Bhakti	894	797	1691
4	Bukit Harapan	737	648	1385
5	Kumbara Utama	889	764	1653
6	Bukit Agung	1266	1121	2387
7	Simang Perak Jaya	1430	1296	2726
8	Gabung Makmur	659	581	1240
9	Jati Mulya	649	613	1262
10	Buatan Baru	1081	931	2012
11	Seminai	1197	1028	2225
12	Delima Jaya	516	448	964
JUMLAH		11175	9873	21048

Sumber : Kantor Kecamatan Kerinci Kanan, 2009.

Tabel IV.1 tersebut memperlihatkan jumlah penduduk di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang mana jenis kelamin pria lebih banyak jumlahnya dari pada jenis kelamin wanita.

b. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Penduduk merupakan suatu peranan yang sangat penting dalam era sekarang ini. Berkualitasnya mutu pendidikan masyarakat akan membawa dampak yang sangat positif terhadap kemajuan dalam wilayah Kecamatan tersebut.

Beberapa tahun belakangan ini dapat dilihat bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Kecamatan Kerinci Kanan terhadap pentingnya pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk di Kecamatan Kerinci Kanan Menurut Tingkat Pendidikan.

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SD/MI	6267	29,8
2	SMP/MTS	4397	20,9
3	SMA	3261	15,4
4	Diploma	203	0,9
5	S1/S2/S3	98	0,4
6	Lain-lain	6823	32,4
JUMLAH		21.048	100

Sumber : Kantor Kecamatan Kerinci Kanan, 2009.

Dari tabel IV.2 bahwa dapat diketahui tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Kerinci Kanan sudah bisa dikatakan baik, dimana mayoritas telah mengenyam pendidikan formal walaupun sebagian besar penduduk hanya sampai tingkat SD/MI. Dari tabel IV.2 diatas dapat diketahui dari sekian penduduk terdapat 6267 orang (29,8%) penduduk hanya tamat SD/MI, kemudian 4397 orang (20,9%) tamat SMP/MTS, 3261 orang (15,4%) menamatkan SMA, 203 orang (0,9%) menamatkan Diploma, 98 orang (0,4%) dan didalam kategori lain-lain terdapat 6823 orang (32,4%).

Pendidikan merupakan prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Kecamatan Kerinci Kanan. Pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai. Pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada di Kecamatan Kerinci Kanan boleh dikatakan hampir seluruhnya tersedia kecuali Perguruan Tinggi. Prasarana pendidikan yang tersedia sudah bisa dikatakan belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jumlah gedung-gedung sekolah yang ada masih belum mampu untuk menampung sebagian besar penduduk Kecamatan Kerinci Kanan pada usia sekolah.

Keadaan yang telah disebut diatas ditunjang dengan adanya prasarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Untuk mengetahui jumlah prasarana pendidikan di Kecamatan Kerinci Kanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.3 : Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Kerinci Kanan.

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SD/MI	13	61,9
2	SMP/MTS	6	28,5
3	SLTA	2	9,5
JUMLAH		21	100

Sumber : Kantor Kecamatan Kerinci Kanan, 2009.

Dari tabel IV.3 menunjukan bahwa prasarana pendidikan yang paling banyak adalah SD/MI sebanyak 13 gedung (61,9%). Berikutnya adalah prasarana gedung SMP/MTS sebanyak 6 gedung (28,5%), dan SMA 2 gedung (9,5%).

b. Mata Pencarian Penduduk

Adapun penduduk di Kecamatan Kerinci Kanan mayoritas memiliki mata pencarian atau jenis pekerjaannya sebagai Petani. Untuk lebih jelasnya mengenai

mata pencaharian penduduk di Kecamatan Kerinci Kanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.4 : Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Kerinci Kanan.

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Petani	2009	9,5
2	Buruh	1499	7,1
3	PNS/Honorar	157	0,8
4	Pedagang	26	0,1
5	Wiraswasta	596	2,9
6	TNI/Polri	36	0,1
7	Dan lain-lain	16725	79,4
Jumlah		21.048	100

Sumber : Kantor Kecamatan Kerinci Kanan, 2009.

Dari tabel IV.4 di atas dapat diketahui bahwa dari sekian banyak jumlah penduduk Kecamatan Kerinci Kanan terdapat 2009 orang (9,5%) Petani, 1499 orang (7,1%) sebagai Buruh, 596 orang (2,9%) sebagai Wirasawasta, 157 orang (0,8%) sebagai PNS/ Honorar, 36 orang (0,1%) sebagai TNI/Polri, 26 orang (0,1%) sebagai pedagang, dan lain-lain sebanyak 16725 orang (79,4).

c. Kehidupan Keagamaan

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar setiap manusia. Kebebasan beragama di Indonesia di jamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29. sikap yang perlu dikembangkan dari pasal tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan umat beragama, dan tidak mencampur adukan kepercayaan.

Dalam wadah Kesatuan Republik Indonesia yang ditangani oleh falsafah Negara (Pancasila), dikenal ada tiga kerukunan beragama yaitu adalah :

- a. Kerukunan umat beragama dengan seagama
- b. Kerukunan umat beragama dengan agama lain
- c. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah

Untuk melihat pemeluk agama yang tumbuh dan berkembang di Kecamatan Kerinci Kanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.5 : Jumlah Pemeluk Agama Di Kecamatan Kerinci Kanan.

NO	PEMELUK AGAMA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Islam	19174	91,0
2	Protestan	1658	8,0
3	Khatolik	186	0,8
4	Hindu	27	0,1
5	Budha	3	0,01
JUMLAH		21.048	100

Sumber : Kantor Camat Kerinci Kanan, 2009.

Dari tabel IV.5 diatas memperlihatkan bahwa mayoritas pemeluk agama adalah beragama islam yaitu sebanyak 19174 atau 91,0%, sedangkan minoritas adalah beragama budha yaitu sebanyak 3 atau 0,01%.

Untuk menjalankan ritual kepada tuhan yang maha esa, sangat perlu didukung oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarananya adalah tempat peribadatan. Dimana tempat peribadatan ini selain dari tempat ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan dalam rang mengsosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat. Banyaknya tempat peribadatan di Kecamatan Kerinci Kanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.6. : Jumlah Sarana Ibadah DiKecamatan Kerinci Kanan.

NO	SARANA IBADAH	JUMLAH	PERSENTASE
1	Masjid	34	33,3
2	Mushola	63	61,7
3	Gereja	4	3,9
4	Wihara	-	-
5	Pura	1	0,9
Jumlah		102	100

Sumber : Kantor Camat Kerinci Kanan 2009.

Tabel IV.6. diatas memperlihatkan bahwa terdapat 34 Masjid dan 63 Mushola sebagai sarana ibadah umat isla, 4 Gereja sebagai sarana ibadah umat Kristen dan 1 Pura sebagai sarana umat Hindu.

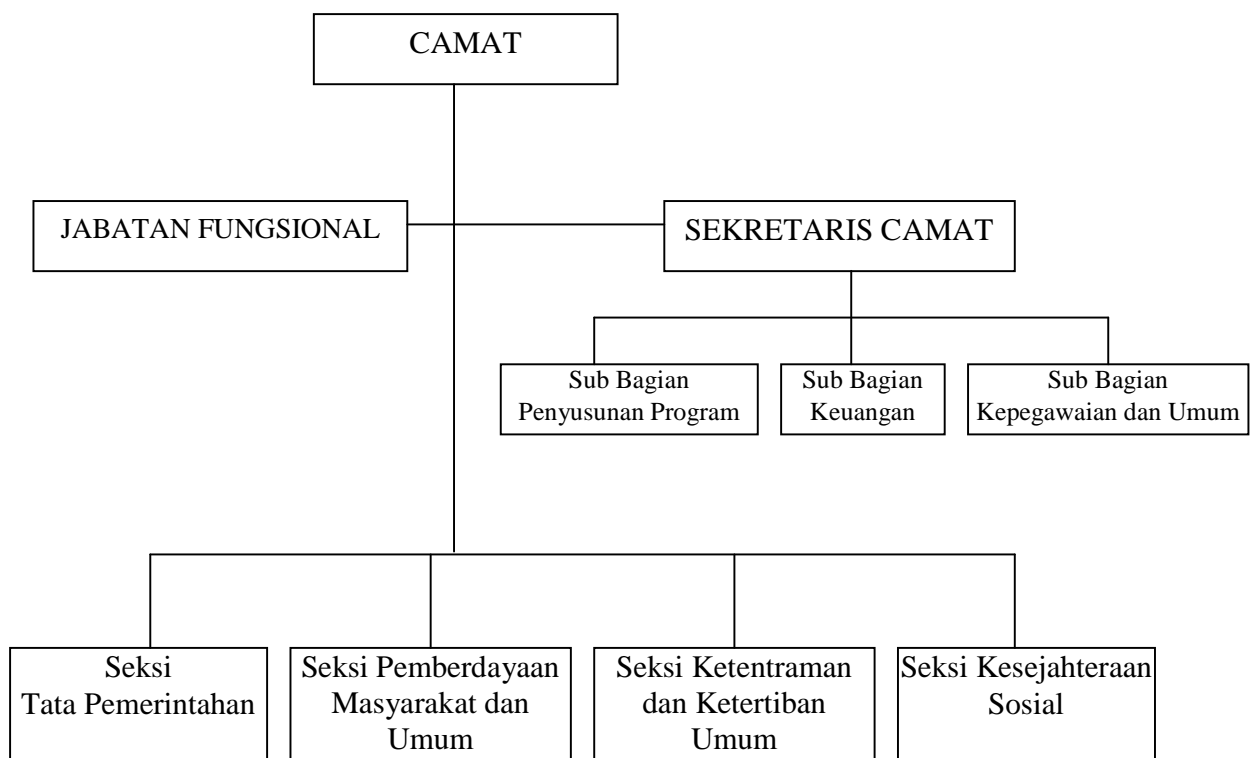
4.3 Struktur Pemerintahan

a. Strukutur organisasi pemerintahan Kecamatan Kerinci Kanan

Pelaksanaan pemerintah wilayah Kecamatan Kerinci Kanan telah melaksanakan atau menerapkan pola maksimal, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 9 tahun 2009 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Siak.

Kecamatan Kerinci Kanan merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak yang terdiri dari 12 desa. Adapun mengenai struktur organisasi dari pemerintah Kecamatan Kerinci Kanan dapat di lihat pada bagan berikut ini:

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.



b. Tugas dan Fungsi Camat

Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota

dibentuk diwilayah kabupaten / kota dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kecamatan sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

c. Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan

Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh perangkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada camat. Adapun tugas dan fungsi perangkat Kecamatan yaitu :

1. Sekretaris Kecamatan

- a. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan yang meliputi administrasi kepegawaian Keuangan, umum dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretaris camat memiliki fungsi sebagai berikut :
 - 1) Pelaksanaan urusan umum;
 - 2) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - 3) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
 - 4) Pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - 5) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Kecamatan.

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Seksi Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi tata pemerintahan memiliki fungsi yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyusun program dan kegiatan seksi tata pemerintahan
- 2) Menyelenggarakan penilaian lomba kelurahan tingkat Kecamatan
 - a. Menyelenggarakan fasilitasi kerjasama antar kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar kelurahan
 - b. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil , inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayahnya
 - c. Menilai prestasi kerja bawahan untuk pembinaan karier;
 - d. Merencanakan dan menyusun serta menyelenggarakan program-program kegiatan pengembangan pemberdayaan masyarakat lintas kelurahan dalam wilayah Kecamatan;
 - e. Mempersiapkan bahan dan data untuk penyelenggaraan pemilihan umum;
 - f. Mempersiapkan bahan dan data untuk pembinaan ideology Negara, kesatuan bangsa dan peningkatan partisipasi politik masyarakat lintas kelurahan;
 - g. Melaksanakan pembinaan keagrarian dalam rangka tertib pertanahan;
 - h. Melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan dan memberikan solusi pemecahan;

- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- j. Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. Untuk menyelenggarakan tugasnya, seksi pemberdayaan manusia memiliki fungsi yaitu sebagai berikut :
 - 1) Menyusun program dan kegiatan;
 - 2) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 3) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 4) Membantu koordinasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana dalam wilayah kelurahan;
 - 5) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perekonomian;

- 6) Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayahnya;
- 7) Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daam wilayah Kecamatan;
- 8) Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan temu karya unit daerah kerja pembangunan;
- 9) Merencanakan dan menyusun program pelaksanaan kegiatan perekonomian dan usaha kecil masyarakat lintas kelurahan;
- 10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi kelancaran produksi dan distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat;
- 11) Membantu instansi terkait dalam penataan dan pemuktahiran data masyarakat miskin;
- 12) Memfasilitasi pembinaan organisasi kepemudaan dan olah raga lintas kelurahan;
- 13) Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga keagamaan, pemberian bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah;
- 14) Mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- 15) Mengkoordinasikan bimbingan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;

- 16) Memfasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan kesehatan;
- 17) Melaksanakan pembinaan kegiatan peningkatan partisipasi dan peranan wanita;
- 18) Memberi saran dan pertimbangan kepada camat;
- 19) Menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
- 20) Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.

4. Seksi ketentraman dan ketertiban

- a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban Umum.
- b. Untuk menyelenggarakan tugasnya, seksi ketentraman dan ketertiban memiliki fungsi yaitu sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana dan program kerja dan kegiatan;
 - 2) Menyenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, ideology, kesatuan bangsa serta kemasyarakatan;
 - 3) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dengan koordinasi apar keamanan yang terkait dalam wilayah Kecamatan;

- 4) Menyelenggarakan fasilitasi partisipasi masyarakat dan pembinaan rukun warga dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 5) Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama;
- 6) Membantu satuan polisi pamong praja dalam menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan bupati serta perundang-undangan;
- 7) Memberi saran dan pertimbangan kepada camat;
- 8) Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.

5. Seksi kesejahteraan sosial

- a. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberian kesejahteraan sosial kepada masyarakat.
- b. Untuk menyelenggarakan tugasnya, seksi kesejahteraan masyarakat memiliki fungsi yaitu sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman
 - 2) Mengolah, merumuskan dan mengevaluasi program yang terkait dengan kesejahteraan rakyat;

- 3) Memfasilitasi kegiatan perkoperasian, dunia usaha, perdagangan dan perbankan;
- 4) Mendorong dan memberdayakan kelompok –kelompok tani, dan peternak.
- 5) Melayani dan memberdayakan organisasi keagamaan, PKK dan organisasi social kemasyarakatan lainnya;
- 6) Mendorong dan memberdayakan organisasi profesi;
- 7) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan kesejahteraan pada sekretaris Kecamatan;
- 8) Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- 9) Menilai prestasi kerja bawahan untuk pembinaan karir;
- 10) Membuat laporan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

a. Tingkat Pendidikan

Sepanjang sejarah factor pendidikan menjadi kemutlakan yang harus diperhatikan dengan seksama oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal usia. Artinya tuntutan akan pendidikan terus mengitari siklus kehidupan manusia, bahkan pendidikan menempati posisi teratas dalam kriteria pecapai suatu kualitas dan produktivitas yang baik.

Sehubungan dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak pemerintah di daerah khususnya pajak bumi dan bangunan, maka konsekuensi tingkat pendidikan yang memadai harus dimiliki oleh masyarakat sebagai Wajib Pajak karena dengan pendidikan yang memadai akan turut menciptakan kelancaran dalam membayar pajak.

Disisi lain, pendidikan menjadi tuntutan terhadap aparat/petugas kolektor melainkan menjadi keharusan setiap individu masyarakat sebagai wajib pajak, yang bermakna seperangkat pengetahuan dan pemahaman yang berorientasi pada pendidikan formal supaya aa yang menjadi kewajibannya dapat dipenuhi dengan baik termasuk pembayaran ajak yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk mengetahui lebih jelas tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden penelitian dari unsur unsur masyarakat wajib pajak di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel V.1 : Keadaan Tingkat Pendidikan Responden Penelitian
Di Kecamatan Kerinci Kanan.**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tamatan SD	210	61,2
2	Tamatan SLTP/MTS	57	16,7
3	Tamatan SLTA/MA	45	13,1
4	Tamat Perguruan Tinggi	31	9,0
Jumlah		343	100

Sumber : Hasil penelitian lapangan, Tahun 2009.

Tabel V.1 diatas memperlihatkan tingkat pendidikan responden penelitian, yaitu terdapat 201 responden (58,6%) berbekal pendidikan SD, kemudian terdapat juga 667 responden (19,5%) dengan berbekal pendidikan SLTP/MTS, sebanyak 44 responden (12,8%) dengan pendidikan SLTA/MA da selebihnya 31 responden (9,0%) yang sudah mencapai jenjang pendidikan tinggi yaitu Sarjana dan Diploma.

b. Kelompok Umur

Disamping tingkat pendidikan tersebut, identifikasi resonden penelitian dapat ditinjau dari tingkat umur yang dimiliki karena konsepsi umur merupakan factor yang turut cara berfikir dan bertindak seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari.

Hal ini logis sekali bahwa kematangan pola pikir dalam usia seseorang masyarakat wajib pajak sangat mewarnai penguasaan dan pemahaman atas berbagai system dan prosedur yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, karena dengan pemahaman itulah kewajiban pembayaran pajak dapat dipenuhi oleh wajib pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan setiap tahunnya.

Untuk mengetahui lebih jelas tingkat umur responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel V.2 : Keadaan Kelompok Umur Responden Penelitian
Di Kecamatan Kerinci Kanan.**

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	26-35 tahun	62	18,1
2	36-45 tahun	107	31,2
3	46-55 tahun	119	34,7
4	56 tahun keatas	55	16,0
Jumlah		343	100

Sumber : Hasil penelitian lapangan, tahun 2009

Tabel V.2 diatas memperlihatkan kelompok umur responden penelitian, yakni terdapat 62 Responden (18,1%) yang berumur 26-35 tahun, kemudian terdapat pula 107 responden (31,2%) yang berumur 36-45 tahun, sebanyak 119 responden (34,7%) berumur 46-55 tahun dan selebihnya 55 responden (16,0%) yang sudah mencapai umur 55 tahun keatas.

c. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperoleh rezeki untuk memenuhi kehidupan hidup keluarganya, pekerjaan erat hubungannya dengan keadaan social ekonomi akan menentukan perilaku individu dalam kehidupannya sehari-hari.

Untuk mengetahui lebih jelas jenis pekerjaan responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.3 : Jenis Pekerjaan Responden Penelitian DiKecamatan Kerinci Kanan.

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	228	66,5
2	Buruh	44	12,8
3	PNS/Honorer	37	10,8
4	Pedagang	19	5,5
5	Wiraswasta	15	4,4
Jumlah		343	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2009.

Tabel V.3 di atas memperlihatkan mata pencaharian responden penelitian, yakni terdapat 228 responden (66,5%) yang bekerja sebagai Petani, 44 responden (12,8%) bekerja sebagai Buruh, 37 responden (10,8%) bekerja sebagai PNS/Honorer, 19 responden (5,5%) bekerja sebagai Pedagang, dan 15 responden (4,4%) bekerja sebagai wiraswasta.

5.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kec. Kerinci Kanan

a. Jumlah Responden Yang Membayar

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat Kecamatan Kerinci Kanan dalam membayar pajak bumi dan bangunan tercermin dari jumlah responden yang telah membayar pajak bumi dan bangunan selama tahun 2009.

Dari informasi yang diperoleh, pada umumnya masyarakat yang membayar PBB pertama karena PBB tersebut adalah merupakan hal yang wajib harus dibayar, kedua jumlahnya menurut mereka sesuai dengan luas tanah dan bangunan yang mereka miliki dan terakhir mereka memang sudah menyediakan anggaran pengeluaran untuk pembayaran PBB yang di potong langsung oleh kelompok tani dari wajib pajak.

Untuk mengetahui lebih jelas jumlah responden yang membayar PBB dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.4 : Jumlah Responden Yang Membayar PBB Di Kecamatan Kerinci
Kanan Tahun 2005-2008.**

No	Tahun	Jumlah Membayar	Jumlah Menunggak	Jumlah	Persentase
1	2005	229	114	343	66,8
2	2006	236	107	343	68,8
3	2007	255	88	343	74,3
4	2008	287	56	343	83,7
Jumlah		252	91	343	73,4

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2009.

Dari tabel V.4 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2005 sampai dengan 2008 terjadi peningkatan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, dimana tahun 2005 terdapat 229 (66,8%) dari responden yang membayar PBB, pada tahun 2006 terdapat 236 (68,8%) dari responden yang membayar PBB, pada tahun 2007 terdapat 255 (74,3%) dari responden yang membayar PBB, dan pada tahun 2008 terdapat 287 (83,7%) dari responden yang membayar PBB. Sehingga secara rata-rata 252 (73,4%) dari seluruh responden adalah pembayar PBB yang setia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada sekretaris camat bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan bisa dikatakan sangat baik, di karenakan di setiap desa memiliki wadah atau koperasi unit desa yang memotong langsung dari pendapatan masyarakat untuk menyisihkan anggaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga setiap

tahunnya masyarakat masyarakat dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

b. Tingkat Kelancaran Membayar PBB

Tingkat kelancaran membayar PBB salah satu indikator adalah semakin lancar membayar berarti semakin jarang menunggak. Untuk itu kepada responden ditanyakan tentang jumlah menunggak membayar pajak bumi dan bangunan pada tahun 2009. Dari informasi yang diperoleh bahwa sebagian besar menunggak karena responden tidak memiliki kelompok tani, tempat pembayaran yang jauh dan jumlah yang dibayarnya sangat kecil.

Untuk melihat kelancaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada responden dapat diketahui pada tabel di bawah ini :

Tabel V.5 : Jumlah Penunggakan Pembayaran PBB Oleh Responden di Kecamatan Kerinci Kanan.

No	Frekuensi Tunggakan	Jumlah	Persentase
1	1 kali	44	12,8
2	2 kali	27	7,9
3	Tidak Pernah	272	79,3
Jumlah		343	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2009.

Dari tabel V.5 tersebut di atas dapat diuraikan bahwa tingkat kelancaran pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilihat dari frekuensi tunggakan

pada responden, ternyata 71 atau 20,7 % dari responden pernah menunggak pembayaran PBB dan 272 atau 79,3 % responden tidak pernah menunggak. 27 atau 7,9 % dari responden menunggak 2 kali, dan 44 atau 12,8 % dari responden hanya menunggak 1 kali.

c. Pemahaman masyarakat tentang PBB

Pemahaman masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat akan semakin mengerti yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam hal ini, masyarakat pada umumnya masih kurang mengerti tentang arti pajak sebenarnya. Karena apabila masyarakat paham mereka dapat menghitung sendiri pajak terutang yang berdasarkan:

- a. Nilai objek pajaknya
- b. Klasifikasi penggolongannya
- c. Nilai jual kena pajak dan tidak kena pajaknya
- d. Dan PBB yang terutang

Selanjutnya, masyarakat juga dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, serta memperoleh hak yang semestinya di dapatkan.

Dalam penelitian ini akan ditanyakan mengenai pemahaman responden tentang pajak bumi dan bangunan, apakah responden mengerti, kurang mengerti atau tidak mengerti. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.6 : Pemahaman Masyarakat Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kerinci Kanan.

No	Pemahaman Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengerti	164	47,8
2	Kurang Mengerti	122	35,6
3	Tidak Mengerti	57	16,6
Jumlah		343	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2009.

Dari tabel V.6 di atas diketahui bahwa 164 (47,8 %) dari responden mengerti tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan 122 (35,6 %) dari responden kurang mengerti tentang Pajak Bumi dan Bangunan, kemudian 57 (16,6 %) dari responden tidak mengerti tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada sekretaris camat bahwa pemahaman masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan dinilai baik karena tiap tahunnya di Kecamatan Kerinci Kanan selalu diadakan penulisan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Kerinci Kanan sehingga masyarakat mengerti akan kewajibannya sebagai wajib pajak dan bisa menentukan yang menjadi objek PBB yang harus di bayar.

d. Besarnya Jumlah Pembayaran PBB

Dari seluruh responden yang membayar PBB di Kecamatan Kerinci Kanan terdapat 3 kategori yaitu kategori besar, sedang dan kecil.

Untuk lebih jelasnya dapat melihat partisipasi masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan yang dilihat dari jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.7 : Jumlah Responden Yang Membayar Menurut Klasifikasi dan Penggolongan Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kerinci Kanan.

No	Objek Pajak	Kelas	Jumlah Responden	Persentase
1	Bumi	A	124	36,2
2	Bumi	B	101	29,4
3	Bangunan	A	67	19,5
4	Bangunan	B	51	14,9
Jumlah			343	100

Sumber : Hasil penelitian lapangan, Tahun 2009.

Dari tabel V.7 di atas dapat diketahui bahwa 124 (36,2%) responden yang membayar PBB dengan kategori bumi kelas A, 101 (29,4%) responden yang membayar PBB dengan kategori bumi kelas B, dan 67 (19,5%) responden yang membayar PBB dengan kategori bangunan kelas A, serta 51 (14,9%) dari responden membayar PBB dengan kategori bangunan kelas B.

e. Tingkat Disiplin Membayar PBB

Bagi responden yang tidak pernah menunggak pembayaran PBB, ini berarti responden atau Wajib Pajak mempunyai disiplin yang tinggi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tiap tahun.

Namun perlu diketahui tingkat disiplin tersebut berdasarkan kapan mereka membayar Pajak Bumi dan Bangunan setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Ada 3 kategori waktu dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu membayar pada waktu yang lebih awal setelah menerima SPPT, membayar pada pertengahan tahun setelah menerima SPPT dan membayar pada waktu akhir tahun atau hampir jatuh tempo setelah menerima SPPT.

Selanjutnya dari informasi yang didapat bahwa tingkat disiplin masyarakat belum bisa dikatakan disiplin karena sebagian besar masyarakat atau responden mengatakan selama awal membayar PBB sampai saat ini tidak tahu kapan SPPT itu diserahkan kepada masyarakat, tahunya masyarakat bahwa sudah diberikan kwitansi pembayaran.

Untuk melihat tingkat disiplin responden dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kerinci Kanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.8 : Tingkat Disiplin Responden Membayar PBB
di Kecamatan Kerinci Kanan.**

No	Waktu pembayaran PBB	Jumlah responden	Persentase
1	1 Juni setelah menerima SPPT pada akhir Mei	104	30,3
2	1 Juli s/d akhir september setelah menerima SPPT	193	56,3
3	>30 September setelah menerima SPPT	46	13,4
Jumlah		343	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2009.

Jika dilihat dari tabel V.8 di atas diketahui bahwa terdapat 46 (13,4%) dari responden membayar PBB dengan tingkat disiplin yang rendah yaitu membayar lebih dari 6 bulan sampai akhir tahun/jatuh tempo pembayaran setelah SPPT diterima, dan 193 (56,3%) dari responden membayar PBB dengan tingkat disiplin sedang yaitu membayar pada 1-6 bulan setelah SPPT diterima, serta 104 (30,3%) dari responden membayar PBB dengan tingkat disiplin tinggi yaitu kurang dari 1 bulan setelah SPPT diterima.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh paneliti kepada sekretaris camat bahwa masyarakat di Kecamatan Kerinci Kanan selalu disiplin dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan tepat pada waktunya dan setiap masyarakat menerima SPPT langsung membayar PBB.

f. Tingkat Pelayanan Pembayaran PBB

Tingkat pelayanan pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor rangsangan bagi responden atau wajib pajak dalam disiplin membayar pajak bumi dan bangunan, apabila wajib pajak mempunyai dasar atau pengalaman dalam membayar PBB dengan pelayanan yang baik, mudah, cepat dan aman, maka tingkat partisipasi pembayaran akan dapat dipertahankan.

Sebaliknya apabila pelayanan pembayaran PBB tersebut buruk, lambat, dan tidak aman, maka responden sebagai wajib pajak akan enggan membayar pajak bumi dan bangunan pada waktu yang tepat, bahkan mungkin diundur-undur atau menunggak sama sekali.

Untuk itu keadaan responden tingkat pelayanan pajak bumi dan bangunan di bagi atas 3 kategori yaitu pelayanan yang baik, cukup baik, dan kurang baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.9 : Tingkat Pelayanan Pembayaran PBB di Kecamatan Kerinci Kanan.

No	Tingkat pelayanan pembayaran PBB	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Baik	180	52,4
2	Kurang Baik	124	36.2
3	Tidak Baik	39	11,4
Jumlah		343	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2009.

Dari tabel V.9 diatas terlihat bahwa 180 (52,4%) dari responden mengatakan bahwa pelayanan pembayaran PPB baik, dan 124 (36,2%) dari responden mengatakan pelayanan pembayaran PBB Kurang baik, kemudian 39 (11,4%) dari responden mengatakan pelayanan pembayaran PBB Tidak baik.

g. Frekuensi Penyuluhan PBB

Penyuluhan tentang pajak bumi dan bangunan kepada responden merupakan salah satu faktor rangsangan bagi responden atau wajib pajak dalam berpartisipasi dan disiplin membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin sering responden mendapatkan penyuluhan, responden akan semakin mengerti tentang pajak.

Adapun program yang dilakukan untuk penyuluhan petugas pemungut adalah sebagai berikut :

1. Petugas pemungut melakukan pemungutan langsung rumah wajib pajak yang terutang.
2. Petugas pemungut melakukan pendataan yang tepat sasaran menurut klasifikasi penggolongan dan ketentuan nilai jual objek pajak.

Selanjutnya program yang dilakukan untuk penyuluhan terhadap masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat agar dapat membayar PBB karena akan bermanfaat untuk dirinya sendiri.
2. Bagi masyarakat yang membayar tepat waktu akan mendapatkan doorprize (hadiah).

Selanjutnya dari informasi yang didapat dari masyarakat yang mengatakan bahwa selama masyarakat tinggal di Kecamatan Kerinci Kanan belum pernah dilakukan adanya penyuluhan, sehingga banyak masyarakat yang kurang mengerti tentang pajak Bumi dan Bangunan, masyarakat hanya mengerti Pajak Bumi dan Bangunan itu kewajiban yang harus dibayar yang objeknya hanya lahan sawit dan rumah, dan masyarakat mengerti kewajibannya karena dari awal rumah dan lahan sawit ini merupakan hasil dari transmigrasi yang di kelola oleh PTPN V. Dari program transmigrasi inilah PTPN V menyarankan kepada masyarakat untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan yang berupa

lahan dan rumahnya. Sehingga sampai saat ini masyarakat mengerti PBB hanya terbentuk dengan sendirinya.

Untuk melihat tingkat penyuluhan yang dilakukan kolektor atau aparat pemerintahan tentang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2009 di Kecamatan Kerinci Kanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.10 : Frekuensi Penyuluhan PBB di Kecamatan Kerinci Kanan.

No	Frekuensi penyuluhan PBB	Jumlah	Persentase
1	Tidak Pernah	343	100
2	2 kali	-	-
3	1 kali	-	-
Jumlah		343	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2009.

Dari tabel V.10 di atas diketahui bahwa 343 (100 %) dari responden mengatakan pihak perpajakan tidak pernah melakukan penyuluhan.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Camat bahwa penyuluhan ini tiap tahunnya selalu dilaksanakan di Kantor Camat Kerinci Kanan yang diperuntukkan pada KAUR (Kepala Urusan Pemerintahan) setiap desa yang ada di Kecamatan Kerinci Kanan.

h. Manfaat PBB Yang Dirasakan Masyarakat

Partisipasi masyarakat akan meningkat apabila mereka merasakan manfaat dari uang yang telah mereka berikan melalui pembayaran Pajak Bumi

dan Bangunan. Dalam penelitian ini ditanyakan manfaat yang telah dirasakan dari Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas umum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.11 : Jawaban Responden Tentang Manfaat PBB Bagi Masyarakat di Kecamatan Kerinci Kanan.

No	Tingkat pelayanan pembayaran PBB	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Bermanfaat	101	29,4
2	Cukup Bermanfaat	178	51,9
3	Tidak Bermanfaat	64	18,7
Jumlah		343	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2009

Dari tabel V.11 di atas terdapat 101 atau 29,4 % dari responden mengatakan PBB bermanfaat, dan 178 atau 51,9 % dari responden mengatakan PBB cukup bermanfaat serta 64 atau 18,7 % dari responden mengatakan bahwa PBB tidak bermanfaat.

5.3 Prosedur Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting maksudnya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, oleh

karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan ekonomi sosial yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya dan memperoleh manfaat daripadanya, oleh karena itu wajar mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak.

a. Tempat dan Tata Cara Pembayaran

Dalam proses penerimaan PBB cara dan tempat pembayaran akan mempengaruhi dalam peningkatan pembayaran, karena cara yang mudah tidak berbelit-belit dan tempat pembayaran yang terjangkau akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam hal menghemat waktu dalam pembayaran PBB-nya.

Oleh karena itu sebaliknya tempat pembayaran ini dapat terjangkau oleh wajib pajak dan tidak memakan waktu yang lama untuk sampai ketempat pembayaran tersebut.

Adapun tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan menurut pasal 11 UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Pelunasan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) adalah sebagai berikut :

1. Pelunasan/pembayaran Pajak berdasarkan SPPT

Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

2. Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan SKPKB

Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB harus dilunasi selambat-lambatnya satu (1) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak oleh wajib pajak.

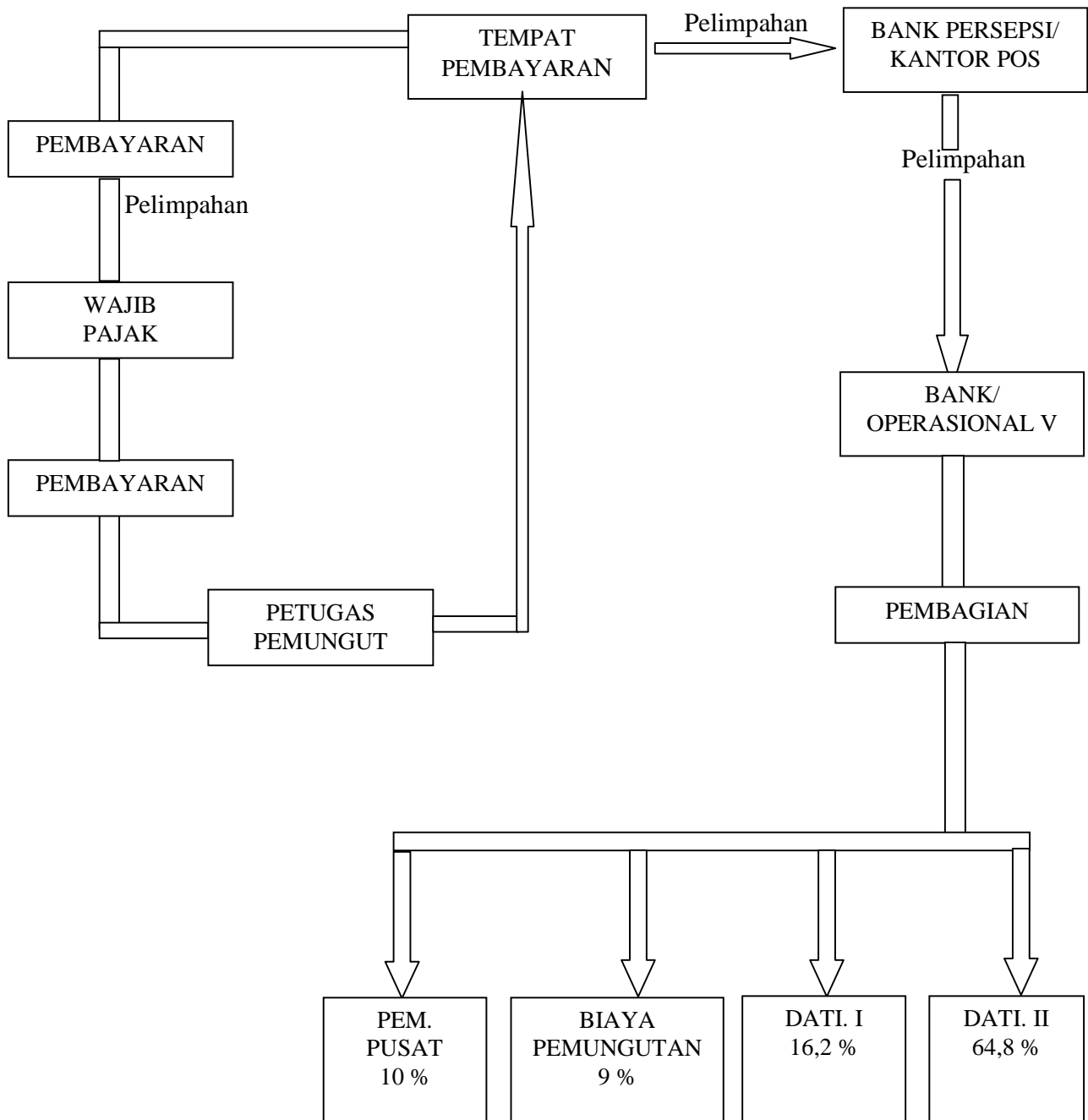
3. Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan STP

Pajak bumi dan bangunan terutang yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak harus dilunasi selambat-lambatnya satu (1) bulan sejak tanggal diterimanya surat taggihan pajak oleh wajib pajak. STP dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal pajak untuk wajib pajak yang tidak melunasi atau kurang membayar pajak terutang dalam SPPT/SKPKB pada saat jatuh tempo.

Sedangkan tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan yang terutang baik yang tercantum pada, SPPT, SKPKB maupun STP dilakukan di :

1. Bank Pemerintah kecuali Bank Pembangunan Indonesia dan Bank tabungan Negara
2. Kantor Pos dan Giro
3. Petugas Pemungut yang ditunjuk (*collector*) secara resmi. Petugas yang ditunjuk tersebut harus menyetorkan hasil penagihan setiap hari ke empat pembayaran yaitu Bank Pemerintah/Kantor Pos dan Giro.

Gambar V.1. : Alur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.



b. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Fasilitas Perbankan Elektronik

Dalam rangka memberikan kemudahan pada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, ditetapkan oleh Dirjen Pajak tentang tata cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Fasilitas Perbankan Elektronik. (KEP 371/02).

Fasilitas Perbankan Elektronik adalah fasilitas pelayanan perbankan secara elektronik seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Phone Banking, Internet Banking, atau fasilitas perbankan lainnya. Adapun tempat pembayarannya adalah pada Bank Pemerintah/swasta nasional yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan fasilitas Perbankan Elektronik.

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui fasilitas perbankan elektronik dengan tata cara sebagai berikut :

1. Wajib pajak mendatangi fasilitas perbankan elektronik dengan membawa data yang lengkap dan benar tentang
 - a. Nomor objek pajak (NOP)
 - b. Tahun pajak, yang menunjukkan periode kewajiban pajak yang akan dibayar
2. Membuka menu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
3. Mengisi elemen dalam tampilan dengan data sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas secara tepat dan lengkap dan benar

4. Meneliti identitas wajib pajak yang terdiri dari NOP, nama, kelurahan, jumlah PBB yang terutang dan tahun pajak yang muncul pada tampilan apabila identitas wajib pajak yang terdiri NOP, nama, kelurahan, jumlah PBB yang terhutang dan tahun pajak pada tampilan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka proses berikutnya harus dibatalkan dan kembali kepada menu sebelumnya untuk mengulang pemasukan data yang diperlukan, karena ada kemungkinan terjadi kesalahan pemasukan data yang diperlukan.
5. Mengambil hasil keluaran fasilitas perbankan elektronik yang berupa tanda terima pembayaran PBB yang disetarakan dengan STTS
6. Mengecek kebenaran tanda terima pembayaran PBB yang diperoleh

c. Pembayaran Kembali Kelebihan Pajak

Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terjadi apabila (PMK 29/05) PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang dan dilakukan pembayran PBB yang tidak seharusnya terutang

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayran PBB, wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dengan jelas kepada Dirjen Pajak up. Kepala kantor pelayanan PBB (Kepala KP PBB)/Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kepala KPP Pratama) yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan.

Selanjutnya tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui Pos, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan.

Surat permohonan yang telah diberikan akan dilaksanakan penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan, dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya surat permohonan wajib pajak, apabila setelah jangka waktu sejak diterimanya permohonan pajak secara lengkap kepala KP PBB/KPP pratama tidak memberikan keputusan, dalam waktu satu bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, kepala KP PBB/KPP pratama atas nama Direktur Jendral Pajak menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SKKP PBB).

Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka waktu satu bulan semenjak diterimanya SKKP PBB hasil penelitian atau pemeriksaan KP PBB/KPP Pratama atas nama Direktur Jenderal Pajak.

Pengembalian dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran PBB (SPMKP PBB).

Sedangkan SPMKP PBB dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :

1. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerja KP PBB/KPP pratama yang menerbitkan SPMKP PBB
2. Lembar ke-3 untuk wajib pajak
3. Lembar ke-4 untuk KP PBB/KPP pratama yang menerbitkan SPMKP PBB.

Dalam pencairan dana kepala KPPN atas nama Menteri Keuangan wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 hari kerja sejak SPMKP PBB diterima.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa secara kuantitas partisipasi masyarakat di kecamatan kerinci kanan dalam membayar PBB baik, dimana sebagian besar responden yaitu 252 (73,4%) adalah pembayar PBB yang setia. Dari aspek tingkat tunggakan dan kelancaran pembayaran PBB dapat dinilai dengan katagori baik dengan persentase 79,3%. Dari aspek pemahaman masyarakat dapat dikategorikan kurang baik yaitu 47,8%. Dari aspek besarnya jumlah PBB yang dibayar oleh sebagian besar masyarakat, 124 (36,2%) membayar PBB dengan kategori bumi kelas A, 101 (29,4%) membayar PBB dengan kategori bumi kelas B, 67 (19,5%) membayar PBB dengan kategori bangunan kelas A, 51 (14,9%) membayar PBB dengan kategori bangunan kelas B. Dari aspek tingkat disiplin membayar PBB dapat dinilai dengan kategori kurang baik yaitu 30,3% yang membayar 1 bulan setelah menerima SPPT. Dari aspek pelayanan pembayaran PBB dapat dinilai dengan kategori baik yaitu 52,4%, dan masyarakat yang menyatakan cukup baik 36,2%, serta 11,4% yang menyatakan kurang baik. Dari aspek frekuensi penyuluhan yang dilakukan pihak perpajakan atau kolektor petugas ternyata 100% dari masyarakat yang terwakili menyatakan tidak baik karena tidak pernah diadakan penyuluhan selama masyarakat tersebut tinggal di Kecamatan Kerinci Kanan. Tetapi dari data yang diperoleh di kecamatan kerinci kanan bahwa sudah pernah dilaksanakan

penyuluhan yang hanya diperuntukkan bagi petugas pemungut pajak pada tiap desa yang ditunjuk. Dari aspek manfaat PBB 51,9% dari sebagian masyarakat menyatakan cukup bermanfaat.

6.2 Saran-Saran

- a. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB di kecamatan kerinci kanan agar dalam menetapkan besarnya nilai jumlah yang akan dibayar atau pajak terutang hendaklah datanya selalu akurat, oleh karena itu kantor pelayanan PBB perlu mendata ulang kembali setiap tahunnya objek pajak yang dimiliki oleh masyarakat.
- b. Perlu diadakan penyuluhan oleh kantor pelayanan PBB untuk meningkatkan wawasan wajib pajak tentang pentingnya membayar PBB yang dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya kepada petugas pemungut yang ditunjuk pada setiap desa. Sehingga masyarakat mengerti tentang cara menetapkan nilai objek pajak dan prosedur pembayaran.
- c. Diharapkan kesadaran dan peran serta masyarakat lebih ditingkatkan lagi dan memiliki rasa tanggung jawab akan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar PBB.
- d. Diharapkan pada instansi terkait di Kecamatan Kerinci Kanan dalam memberikan pelayanan PBB lebih ditingkatkan lagi yang lebih mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi,

sehingga dapat terkoordinir dengan baik, dengan harapan dapat tercapai tujuan sebagaimana mestinya.

- e. Pelaksanaan prosedur pembayaran PBB diharapkan sesuai dengan prosedurnya guna mempermudah dalam hal pembayaran yang menghemat waktu, tidak berbelit-belit dan dapat terjangkau oleh setiap wajib pajak akan dapat meningkatkan pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu., 1991. *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Kho, Josef Riwu., 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara republik Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo., 2003. *Perpajakan (Edisi Revisi)*, Yogyakarta : Andi.
- Mardikanto. T., 1977. *Petunjuk Penyuluhan*, Surabaya : Usaha Nasional.
- Pajak Bumi dan Bangunan (Seri Perpajakan), 2000. Jakarta : Sinar Grafika.
- Pandiangan, Liberty., 2002. *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Erlangga.
- Panggabean, D., 1998. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bina Desa Hutan*, Medan : USU.
- Pasaribu, I.L, dan Simandjuntak. B., 1986. *Sosiologi Pembangunan*, Bandung : Tarsito.
- Pudyatmoko, Sri., 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta : Andi
- Sanit, A., 1990. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, Yogyakarta : Aditya Medya.
- Sastropetro., 1988. *Partisipasi Komunikasi Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Alumni.
- Setiawan, Agus dan Hardi., 2006. *Perpajakan Bendaharawan Pemerintah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang P., 2005. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Slamat, Margono., 1990. *Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Desa*, Malang : LPM Universitas Brawijaya.
- Sugiyono., 2005. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Sukirno, Sadono., 2006. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta : Kencana.

Sumantri, Juju., 1987. *Filsafat Ilmu Sosial*, Yogyakarta : Erlangga.

Tjahjono, Achmad dan Triyono Wahyudi., 2003. *Perpajakan Indonesia – Pendekatan Soal Jawab dan Kasus*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Tjokroamidjojo, Bintoro., 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES.

Dokumen-Dokumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Tahun 2008	6
Tabel 1.2	Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Kerinci Kanan	7
Tabel III.1	Jumlah Populasi dan Sampel di Kecamatan Kerinci Kanan.....	34
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kerinci Kanan	38
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk di Kecamatan Kerinci Kanan Menurut Tingkat Pendidikan	39
Tabel IV.3	Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Kerinci Kanan	40
Tabel IV.4	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Kerinci Kanan	41
Tabel IV.5	Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Kerinci Kanan.....	42
Tabel IV.6	Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Kerinci Kanan.....	43
Tabel V.1	Keadaan Tingkat Pendidikan Responden Penelitian di Kecamatan Kerinci	54
Tabel V.2	Keadaan Kelompok Umur Responden Penelitian di Kecamatan Kerinci Kanan	55
Tabel V.3	Jenis Pekerjaan Responden Penelitian di Kecamatan Kerinci Kanan	56
Tabel V.4	Jumlah Responden Yang Membayar PBB di Kecamatan Kerinci Kanan Tahun 2005-2008	58
Tabel V.5	Jumlah Penunggakan Pembayaran PBB oleh Responden di Kecamatan Kerinci Kanan	59
Tabel V.6	Pemahaman Masyarakat Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kerinci Kanan	61

Tabel V.7	Jumlah Responden Yang Membayar Menurut Klasifikasi dan Penggolongan Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kerinci Kanan .	62
Tabel V.8	Tingkat Disiplin Responden Membayar PBB di Kecamatan Kerinci Kanan	63
Tabel V.9	Tingkat Pelayanan Pembayaran PBB di Kecamatan Kerinci Kanan	65
Tabel V.10	Frekuensi Penyuluhan PBB di Kecamatan Kerinci Kanan.....	67
Tabel V.11	Jawaban Responden Tentang Manfaat PBB bagi Masyarakat di Kecamatan Kerinci Kanan	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Organisasi Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak..	44
Gambar V.1	Alur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	71